

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu dan hampir setiap individu/personal pernah merasakan pendidikan dari dulu sampai saat ini. Kata pendidikan sudah tidak asing lagi didengar ditelinga kita, karena kita semua pernah menempuh pendidikan agar tercapainya sebuah cita-cita dan keinginan.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perkembangan zaman di dunia pendidikan terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan secara hukum dan mempunyai tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, sangat membutuhkan personel-personel Polri yang mampu bekerja secara profesional dan proporsional dalam mewujudkan tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan rasa aman dan keadilan.

Untuk mewujudkan sosok Polri yang profesional dan mampu memenuhi tuntutan serta menjalankan tugas pokoknya secara baik, maka Polri berbenah diri dengan memperbaiki aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja Polri, antara lain : aspek kultural, aspek struktural serta aspek instrumental. Sebagai wujud nyata Polri dalam

merubah aspek kultural, maka Polri melakukan pembenahan mulai dari proses rekrutmen sampai dengan proses pendidikan.

Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Polri sesuai dengan visi dan misi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang profesional, maka seorang anggota Polri harus mahir, terampil dan patuh hukum serta memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat.

Reformasi Polri (Cryshnanda, 2009: 38) yang telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun telah merubah paradigma Polri untuk menuju polisi sipil (*civilian police*). Perubahan ini secara langsung juga berkaitan dengan perubahan kedudukan, tugas, peran dan gaya pemolisian yang lebih disesuaikan dengan aspirasi dan harapan masyarakat akan kebutuhan rasa aman dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum serta menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Pendidikan Polri merupakan suatu proses untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang dibutuhkan dalam pemenuhan tuntutan tugas-tugas kepolisian. Selain itu pendidikan Polri juga merupakan suatu rangkaian kegiatan dari siklus pembinaan manajemen sumber daya manusia sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri tetap berpegang pada prinsip keterpaduan dengan tujuan untuk mengakomodir sistem pendidikan yang diterapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Prinsip keterpaduan ini dapat dilihat didalam Peraturan Kapolri Nomor 6 (2017: 897) bahwa semua sistem dan jenjang kependidikan Polri berada dalam satu institusi/lembaga yaitu Lemdiklat Polri, yang mengarah pada sistem pendidikan satu pintu.

Dengan sistem pendidikan satu pintu ini diharapkan Lemdiklat Polri akan dapat melahirkan sosok-sosok Polri yang profesional dan berkualitas. Selain memiliki

kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang luas juga harus memiliki sikap, mental dan perilaku yang humanis, berwibawa dan cerdas, sesuai dengan filosofi pendidikan Polri yaitu Mahir, Terpuji, Patuh Hukum dan Unggul. Keadaan seperti ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan Polri masa kini dan yang akan datang terhadap tuntutan masyarakat saat ini yang semakin luas, yaitu tuntutan akan perubahan yang terjadi agar Polri lebih dapat bersahabat dengan masyarakat. Sehingga dapat menumbuhkan cara pandang baru dalam tubuh Polri melalui perubahan *mindset* dan *culture set* yaitu budaya kepolisian dari budaya militeristik menjadi budaya sipil. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya suatu kondisi yang baru dalam lingkungan kepolisian sehingga berangsur-angsur akan terjadi suatu hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat. Sehingga dapat di pertemukan dalam suatu forum kerjasama yang baik dan mempunyai tingkat kepercayaan yang kokoh dan kuat.

Kadarmanta (2008: 67) dalam bukunya menyatakan: “Pendidikan Polri diselenggarakan dengan mengintegrasikan aspek pengetahuan yang merupakan penekanan dari segi pendidikan sehingga akan lebih terlihat sempurna yaitu pengetahuan yang ada diaplikasikan dalam tugas-tugas kepolisian”. Pendidikan yang diselenggarakan mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk sumber daya manusia yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu seperti komunikasi, negosiasi sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bertujuan untuk melengkapi sumber daya manusia Polri dengan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan tingkah laku (*attitude*) yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan tugas di lapangan. Menurut Benjamin S. Bloom dalam Nana Sudjana (2000: 152-153) bahwa tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan Teori Taxonomy Bloom ini terdapat dalam tiga domain, yaitu:

1. Ranah Kognitif (*Cognitive Domain*), didalamnya terdapat perilaku-perilaku yang mengedepankan aspek intelektual, contohnya yaitu pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.
2. Ranah Afektif (*Affective Domain*), yaitu berisi perilaku-perilaku yang mengedepankan aspek perasaan, seperti minat, sikap, apresiasi dan bagaimana cara menyesuaikan diri.
3. Ranah Psikomotor (*Psychomotor Domain*), didalamnya berisi perilaku-perilaku yang mengedepankan aspek keterampilan seperti tulisan tangan, kecepatan mengetik, berenang, dan cara mengoperasikan mesin.

Dengan menggunakan teori tersebut dapat dianalisis bahwa dalam pendidikan Polri, dilihat dari ranah kognitif (*cognitif domain*) diharapkan dapat melahirkan hasil didik yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Dalam ranah ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang kepolisian saja tetapi pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai ilmu lainnya seperti yang disampaikan oleh Harsja Bachtiar dalam Andirandotama (2017: diakses 14 November 2017) menyatakan bahwa “..... masing-masing sesuai dengan kelaziman cabang ilmu pengetahuan sendiri

Pengetahuan ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang kepolisian saja namun juga pengetahuan yang menyangkut ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan bidang kepolisian mengingat ilmu kepolisian ini sangat kompleks yang terdiri dari berbagai bidang, seperti disampaikan oleh Harsja Bachtiar dalam Andirandotama (2017: diakses 14 November 2017) menyatakan bahwa “.....masing-masing sesuai dengan kelaziman masing-masing cabang ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini dikenal sebagai pengetahuan multidisiplin, pengetahuan yang didapat melalui serangkaian pengkajian yang sesungguhnya terpisah satu dari yang lain walaupun memusatkan perhatian dalam permasalahan yang sama. Dengan mempunyai pengetahuan kepolisian

yang mendalam diharapkan hasil didik dapat menjawab tantangan tugas di lapangan yang setiap harinya semakin berkembang sehingga anggota Polri dapat terlatih untuk berpikir secara cepat dan tepat dalam menjawab setiap permasalahan yang ada di masyarakat.

Dilihat dari ranah afektif (*affective domain*), bahwa hasil didik tersebut dalam melaksanakan tugasnya diharapkan akan mempunyai rasa percaya diri yang lebih karena sudah didukung oleh kemampuan secara intelektual (kognitif) dan juga dapat menyesuaikan diri dengan tugas apapun terutama tugas kepolisian yang berhubungan dengan masyarakat dimana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kompleks dan beragam suku, adat, bahasa, budaya, dan kebiasaan yang berada dari Sabang sampai Merauke.

Dalam ranah psikomotorik (*psychomotor domain*) diharapkan hasil didik mempunyai keterampilan dalam fungsi kepolisian sehingga dalam melaksanakan tugasnya di lapangan seperti keterampilan melakukan penyidikan dan penyelidikan, keterampilan dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, keterampilan dalam memberika pelayanan kepada masyarakat, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri.

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi peserta didik dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan yang ada sehingga berhasilnya pelaksanaan pendidikan ditentukan juga oleh tersedianya komponen yang ada dan komponen standar pendidikan yang mempunyai standar khusus terhadap pelaksanaan pendidikan Polri sesuai dengan tuntutan kompetensi. Pendidikan Polri yang sedang dilaksanakan saat ini adalah pendidikan yang berbasis kompetensi diharapkan dapat melahirkan hasil didik yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam mencapai proses pendidikan Polri yang berbasis kompetensi diperlukan adanya profil Polri, kerangka kurikulum induk pendidikan Polri, ketersediaan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, proses evaluasi dan adanya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang memadai dan mumpuni. Dalam proses pembelajaran pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Polri komponen standar pendidikan sangat diperlukan, yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri nomor 14 (2015: 13) yaitu:

1. Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan Polri;
2. Standar Isi meliputi kurikulum dan bahan ajar (Hanjar) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan Polri;
3. Standar Proses terdiri dari proses pembelajaran dan pengasuhan pada setiap program pendidikan Polri;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
5. Standar Sarana dan Prasarana meliputi fasilitas pendidikan dan alins a;ongins pada setiap satuan pendidikan Polri;
6. Standar Pengelolaan dilaksanakan dengan pentahapan sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
7. Standar Pembiayaan pendidikan Polri terdiri dari: biaya investasi dan biaya operasional;
8. Standar Penilaian terdiri dari:
 - a. penilaian akademik hasil belajar dilakukan oleh pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. penilaian kepribadian peserta didik dilakukan oleh pendidik dan pengasuh pada satuan pendidikan Polri yang bersangkutan; dan
 - c. penilaian kesehatan dan kesamaptaan jasmani dilakukan oleh pengemban fungsi Dokkes dan tim jasmani pada satuan pendidikan Polri.

Delapan standar komponen pendidikan tersebut merupakan rujukan bagi Lemdiklat Polri dalam melaksanakan operasional pendidikan. Dalam mencapai hasil yang sesuai dengan standar komponen maka diperlukan suatu sistem yang terdiri dari *input*, *proses* dan *output*. Dalam sebuah sistem pendidikan yang menjadi *input* adalah peserta didik sedangkan *outputnya* adalah hasil didik yang mempunyai kompeten di bidangnya masing-masing. Untuk mendapatkan hasil didik yang berkompeten maka

diperlukan suatu proses pendidikan. Proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan maka harus memenuhi delapan standar komponen pendidikan di atas.

Sistem pendidikan Polri yang ada pada saat ini diharapkan mampu menciptakan personel Polri atau sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul, mempunyai kepribadian yang baik dan semangat yang tinggi. Untuk dapat mewujudkan personel Polri yang berkualitas maka harus dibuat terobosan baru dalam pendidikan Polri. Salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Polri adalah menjadikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sebagai *centre of excellence* (pusat keunggulan). Lemdiklat Polri diharapkan menjadi motor penggerak dalam upaya peningkatan kinerja Polri untuk menjadi organisasi yang unggul melalui terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Bambang Hendarso Danuri seperti dikutip dari buku Profil SPN Jambi Menuju Terwujudnya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sebagai *centre of excellence*:

Profil SPN Jambi (2010: 62) menyatakan bahwa “Lembaga pendidikan Polri juga harus dibenahi..., kemudian merencanakan perubahan sesuai prioritas, disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kepentingan pelaksanaan tugas. Perlu dipahami bahwa perubahan kultur sesungguhnya berawal dari lembaga pendidikan. Untuk itu, jadikan Lembaga Pendidikan Polri sebagai *centre of excellence* (Pusat Keunggulan) dalam membentuk anggota Polri yang humanis, berbudaya dan cerdas”.

Lembaga pendidikan sebagai pusat keunggulan mengupayakan untuk merubah dirinya menjadi suatu pusat keunggulan. Perwujudan Lemdiklat Polri sebagai pusat keunggulan adalah:

1. Dapat melahirkan personel Polri yang unggul yaitu yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya di lapangan..

2. Dapat menjadi pusat rujukan dari berbagai permasalahan yang ada dalam organisasi yang artinya Lemdiklat Polri harus mampu menyediakan buku-buku, hanjar atau referensi yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan organisasi serta mengadakan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada dalam masyarakat.
3. Melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bidangnya agar memiliki standar kinerja yang tinggi dengan mempunyai proses kerja yang unggul contohnya menyusun piranti lunak yang baku dan harus dipatuhi oleh setiap anggota yang berada didalamnya sebagai standar acuan dalam bekerja. Selain itu juga dengan menggalang kerja sama kelompok yang baik dan juga kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan pengembangan pendidikan Polri. Dalam setiap pelaksanaan kegiatannya lembaga pendidikan harus mempunyai proses perencanaan, evaluasi dan kontrol yang komprehensif.
4. Harus diawaki oleh personel-personel yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus dikembangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat mencapai standar keunggulan di bidangnya. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan sistem pembinaan karir yang disesuaikan dengan kualitas atau potensi dari sumber daya manusianya serta dengan memberikan sistem imbalan yang sesuai. Imbalan di sini tidak mutlak harus berbentuk uang/gaji tetapi dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan agar lebih meningkatkan lagi kemampuannya.
5. Harus memiliki budaya organisasi yang unggul dalam arti tidak banyak muncul keresahan, konflik ataupun hal-hal yang menyebabkan personilnya merasa tidak nyaman dalam bekerja sehingga akan tercipta kondisi yang sehat dan nyaman, dengan demikian setiap personil yang berada di dalamnya akan dapat berfikir

secara jernih, tidak memihak, obyektif dalam menilai sesuatu dalam pekerjaannya dan selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan menuju ke arah yang lebih untuk organisasi Polri.

Proses reformasi Polri telah menampakkan hasil pada struktural maupun instrumental yang memantapkan kedudukan dan susunan Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta semakin mengemukanya paradigma baru sebagai polisi yang berwatak sipil (*civilian police*), sementara itu pembenahan aspek kultural masih berproses, antara lain melalui: pembenahan rekrutmen personel, kurikulum pendidikan, sosialisasi nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sikap perilaku anggota Polri belum sepenuhnya mencerminkan jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Penampilan Polri masih menyisakan sikap perilaku yang arogan, cenderung menggunakan kekerasan, diskriminatif kurang responsif dan belum profesional masih merupakan masalah yang harus dibenahi secara terus menerus. Sehingga Polri memerlukan rangkaian strategi yang disebut dengan Grand Strategi Polri (No.Pol.: Skep/360/VI/2005).

Program Grand Strategi Polri 2005-2025 yang menitikberatkan pada akselerasi transformasi Polri melalui program reformasi birokrasi terus dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sudah tersusun yaitu tahap I 2005-2019, tahap II 2010-2014 dan tahap III 2015-2025. Sejalan dengan program tersebut, untuk mewujudkan Lemdiklat Polri sebagai *centre of excellence* juga mengikuti tahapan-tahapan grand strategi yang mencakup:

1. Tahap I 2005-2009 (sudah dilaksanakan)

Dalam tahapan ini berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menuju terwujudnya *centre of excellence* salah satunya yaitu: Lemdiklat Polri telah berusaha

meningkatkan perbaikan kualitas kurikulum dan bahan ajar dengan mengeluarkan beberapa peraturan Kepala Lemdiklat Polri dan bekerja sama dengan Staf Ahli Kapolri bidang pendidikan serta Universitas Negeri Jakarta dalam rangka menyelaraskan sistem kurikulum dan hanjar yang sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk tingkat pendidikan pembentukan, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk pendidikan pengembangan spesialisasi dan pendidikan pengembangan umum.

2. Tahap II (2010-2014)

Dalam tahapan ini upaya Lemdiklat Polri untuk dapat mewujudkan sebagai pusat keunggulan yaitu dengan melakukan beberapa pada pengendalian mutu pendidikan tidak terlepas dari 8 (delapan) standar komponen pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *total quality* manajemen yaitu suatu pendekatan pengelolaan peningkatan mutu secara menyeluruh dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang yang eksis dalam bidang pendidikan.

3. Tahap terakhir dalam Grand Strategi Polri yaitu dimulai tahun 2015-2025.

Dalam tahap ini upaya Lemdiklat Polri untuk menuju lembaga pendidikan sebagai *centre of excellence* yaitu dengan melakukan pengembangan-pengembangan pada pemahaman kebutuhan peserta didik, Stakeholders dan masyarakat. Dalam hal ini Lemdiklat Polri ingin menciptakan hasil didik yang siap pakai yang mempunyai kompetensi yang dapat menjawab tantangan tugas organisasi dan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penulisan ini pada “Evaluasi Program Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Polri di Sekolah Staf Pimpinan Tingkat Pertama Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, dengan sub fokus yang akan diteliti adalah:

1. Analisa kebutuhan program pendidikan Polri; Tujuan Program Pendidikan dan Pengembangan Spesialisasi Polri T.A. 2018;
2. Peserta didik dan alokasi waktu pendidikan; Kurikulum Program Pendidikan dan Pengembangan Spesialisasi Polri T.A. 2018;
3. Proses pendidikan, diantaranya tahap I (pengantar), tahap II (pendalaman materi), tahap III (pembulatan) paada pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan spesialisasi Polri T.A. 2018;
4. Hasil penilaian pada aspek akademik, aspek mental kepribadian.

C. Pertanyaan Penelitian

Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa kebutuhan program pendidikan Polri; Tujuan Program Pendidikan dan Pengembangan Spesialisasi Polri T.A. 2018?
2. Bagaimana peserta didik dan alokasi waktu pendidikan; Kurikulum Program Pendidikan dan Pengembangan Spesialisasi Polri T.A. 2018?
3. Bagaimana proses pendidikan, diantaranya tahap I (pengantar), tahap II (pendalaman materi), tahap III (pembulatan) program pendidikan dan pengembangan spesialisasi Polri T.A. 2018?
4. Bagaimana hasil penilaian pada aspek akademik, aspek mental kepribadian?

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu Manajemen Pendidikan.
2. Memberikan masukan kepada pimpinan dalam institusi Polri dalam pengambilan keputusan lebih lanjut terkait konteks, input, proses dan hasil program pendidikan dan pengembangan spesialisasi di Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.